

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Constitutional Law: Implikasi Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Terhadap Sistem Bernegara Latvia

Nur Rohim Yunus *

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5i5.38454](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i5.38454)

Abstract:

Latvia is a democratic nation located in Northern Europe that operates under a parliamentary republican style of governance. Latvia, as a unitary state, exhibits a centralized distribution of government power, with its capital located in Riga. The Republic of Latvia operates under a republican form of government, wherein the executive authority is wielded by the prime minister and his cabinet, who are accountable to the parliament, known as the Saeima. The president, in their capacity as the chief executive, assumes a ceremonial and diplomatic function, having been chosen by the Saeima for a designated duration of service. The governmental structure of Latvia exhibits a harmonious equilibrium between legislative and executive authority, wherein the parliament assumes the principal role in enacting legislation and overseeing the government, while the prime minister assumes responsibility for the day-to-day administration. The role of the President in Latvia's national unity and exterior relations is of symbolic significance. The Republic of Latvia exhibits a robust parliamentary democracy characterized by a well-balanced framework of government institutions, as evidenced by its form of state, form of government, and system of governance.

Keywords: Latvia; Form of state; Form of government; Government system

* Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Email: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id.

A. PROLOG

Latvia adalah negara berdaulat yang terletak di wilayah Baltik di Eropa Utara. Negara tersebut berbatasan dengan Estonia di utara, Lituania di selatan, Rusia di timur, dan Laut Baltik di barat. Riga berfungsi sebagai ibu kota dan ibu kota negara Latvia. Riga, yang terletak di sepanjang tepi Sungai Daugava, memiliki latar belakang sejarah yang signifikan dan lanskap arsitektur yang luar biasa, mencakup beberapa bangunan Art Nouveau yang terkenal.¹

Bahasa Latvia, bahasa resmi yang ditetapkan untuk Latvia, termasuk dalam rumpun bahasa Baltik dan memiliki kemiripan yang mencolok dengan bahasa Lituania, meskipun terdapat perbedaan yang mencolok. Penggunaan bahasa Rusia merupakan hal yang lazim, khususnya di kalangan komunitas berbahasa Rusia yang tinggal di Latvia.²

Lambang Negara Latvia	Bendera Negara Latvia
 The coat of arms of Latvia features a shield with a sunburst in the center, flanked by a red lion on the left and a white eagle on the right. Above the shield are three yellow stars. The shield is supported by a red ribbon and a white ribbon.	 The flag of Latvia consists of three horizontal stripes: a top red stripe, a middle white stripe, and a bottom red stripe.

¹ Pleps, J. (2009). Fundamental Rights and Latvian Constitution (1918–1934). *Miscellanea Historico-Iuridica*, 8(2), 11-26.

² Kučš, A. (2014). Protection of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latvia during the Interwar Period and

Latvia telah mengalami ekspansi ekonomi yang besar setelah kemerdekaannya pada tahun 1991. Latvia telah berhasil menerapkan reformasi ekonomi dan saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tercepat di Uni Eropa, meskipun menghadapi tantangan selama krisis keuangan global pada tahun 2008.³

Pada tahun 2004, Latvia bergabung dengan Uni Eropa dan saat ini menjadi anggota NATO. Kedua keanggotaan tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi negara ini, termasuk peningkatan bantuan keamanan dan peningkatan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Eropa lainnya.

Latvia memiliki warisan budaya yang beragam yang mencakup berbagai bentuk seperti musik rakyat, tarian, dan festival tradisional. Salah satu festival terkenal adalah "Lígo", yang diadakan pada malam terpendek dalam setahun, berfungsi sebagai platform bagi individu untuk berkumpul dan memperingati musik, tarian, dan adat istiadat budaya Latvia. Negara ini memiliki topografi yang indah, dengan hutan yang luas, perairan, dan garis pantai yang membentang di sepanjang Laut Baltik. Taman

after the Restoration of Independence. *Journal of the University of Latvia. Law*, (7), 54-62.

³ Rodiņa, A. (2017). Welfare As a Constitutional Value In The Constitution Of The Republic Of Latvia. *Приложение На Конституционните Принципи В Публичното И Частното Право*, 72.

Nasional Gauja dikenal luas sebagai tujuan wisata alam terkemuka di negara Latvia.

Latvia memiliki tingkat keragaman etnis yang menonjol di antara masyarakatnya, dengan demografi utama terdiri dari orang Latvia, dengan kehadiran etnis minoritas seperti Rusia, Ukraina, dan Belarusia.

Latvia memiliki latar belakang sejarah yang kaya, ditandai dengan periode pemerintahan berturut-turut di bawah berbagai kekuatan asing, seperti kekaisaran Rusia, Swedia, dan Jerman. Latvia mengalami masa pendudukan oleh Uni Soviet dan kemudian Nazi Jerman pada abad ke-20, hanya untuk memulihkan kemerdekaannya pada tahun 1991.

Latvia memiliki konstitusi yang dikenal sebagai "Satversme" dalam bahasa Latvia. Konstitusi ini berfungsi sebagai undang-undang dasar negara, mengatur sistem pemerintahan, hak-hak dasar warga negara, dan kerangka organisasi lembaga pemerintah.⁴

Diadopsi pada tanggal 15 Februari 1922, konstitusi ini memiliki keunggulan sebagai salah satu konstitusi paling kuno secara global, setelah Perang Dunia I dan berdirinya Republik Latvia. Sistem pemerintahan republik parlementer di Latvia ditetapkan oleh Konstitusi, di mana wewenang didistribusikan di antara pemerintahan, badan

⁴ Dupate, K. (2016). The constitutional social security rights in Latvia. *Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej*, 23.

legislatif, dan peradilan. Struktur pemerintahan Latvia terdiri dari seorang presiden, yang dikenal sebagai Presiden Republik, parlemen yang disebut Saeima, dan kabinet menteri yang dipimpin oleh perdana menteri.⁵

Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara, yang mencakup hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum yang setara. Kerangka konstitusional mengakui bahasa Latvia sebagai bahasa resmi negara tersebut, sekaligus menetapkan perlindungan untuk mencegah penggunaan bahasa minoritas dalam bidang pendidikan dan administrasi.⁶

Proses amandemen konstitusi tunduk pada peraturan yang ketat dan memerlukan dukungan dua pembacaan terpisah dari Saeima (parlemen), serta persetujuan referendum jika perubahannya signifikan.

Konstitusi berfungsi sebagai landasan kerangka hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi Latvia mencakup langkah-langkah yang bertujuan untuk menjaga lingkungan dan sumber

⁵ Rodiņa, A. (2014). Constitutional Court of the Republic of Latvia: constitutional regulation, competence and content of the petitions. *Studia Politologiczne*, 32, 273-300.

⁶ MUIŽNIEKS, N. (2020). The Influence of the Idea of Human Rights on Latvia. *The Centenary of Latvia's Foreign Affairs*, 168.

daya alam, yang menggarisbawahi kewajiban negara untuk melestarikan lingkungan demi kepentingan generasi mendatang.⁷

Konstitusi Latvia berfungsi sebagai landasan struktur pemerintahan dan masyarakat Latvia, yang mengakui hak-hak warga negaranya dan mendefinisikan struktur sistem demokrasi yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum.



B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Negara Latvia dan implikasinya dalam Pembagian Wilayah

Latvia bercirikan negara kesatuan, dimana konsentrasi kewenangan pemerintahan sebagian besar terkonsentrasi pada pemerintah pusat yang berlokasi di Riga, ibu kota negara. Dalam struktur negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai

⁷ Ziemele, I., Spale, A., & Jurcena, L. (2020). The Constitutional Court of The Republic of Latvia. The Max Planck Handbooks in European Public Law, 3, 505-564.

wewenang tertinggi dan memberikan otonomi terbatas kepada daerah atau badan administratif yang lebih kecil.⁸

Dalam konteks Latvia, pemerintah pusat menjalankan wewenang atas aspek-aspek penting pemerintahan, yang meliputi militer, keamanan, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, pemerintah daerah diberikan otonomi, yang memberi mereka wewenang untuk merumuskan kebijakan di tingkat regional dan lokal, yang mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lokal.

Meskipun pemerintahan lokal di Latvia diberi otonomi pada tingkat tertentu, pemerintah federal tetap memegang otoritas tertinggi. Konstitusi Latvia menggambarkan struktur alokasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta peraturan untuk koordinasi dan kolaborasi antara keduanya untuk menjamin tata kelola yang baik dan produktif di seluruh negara.⁹

Penerapan bentuk negara kesatuan di Republik Latvia mengarah pada pembentukan pembagian wilayah yang jelas dan kerangka administratif yang terstruktur secara hierarki.

⁸ RODIŅA, A., KĀRKLIŅA, A., & Vogin, F. (2018). Republic Of Latvia. *European Review of Public Law*, 30(4).

⁹ Daškevičs, A. (2022). Human rights in the emergency situation: constitutional perspective of Latvia.

Dampak dari bentuk negara kesatuan terhadap pembagian wilayah di Latvia adalah sebagai berikut:

Sentralisasi otoritas politik di Latvia sebagian besar terkonsentrasi di Riga, ibu kota negara. Di bidang pemerintahan, pemerintah pusat memiliki yurisdiksi atas bidang-bidang penting seperti pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri, dan kebijakan ekonomi nasional.

Struktur administrasi negara bagian Latvia mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat di tingkat nasional hingga pemerintah daerah di tingkat paling bawah. Kerangka konseptual ini mencakup beberapa entitas administratif, termasuk kota, kabupaten, dan kotamadya. Latvia secara geografis terbagi menjadi kota-kota dan distrik-distrik, dengan masing-masing entitas memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas dalam mengawasi urusan-urusan lokalnya, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, dan infrastruktur lokal.¹⁰

Meskipun terdapat pembagian administratif yang berbeda, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkolaborasi untuk menjamin koordinasi yang efisien dalam memberikan layanan publik dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan nasional dan daerah.

¹⁰ Zaagman, R. (1999). Conflict prevention in the Baltic States: the OSCE high commissioner on national minorities in Estonia, Latvia and Lithuania.

Bentuk negara kesatuan Republik Latvia menghasilkan sistem administrasi yang sangat terstruktur, yang memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada penduduk di seluruh negeri.

Pembagian administratif Latvia terdiri atas 110 munisipalitas dan 9 daerah metropolitan pada tingkat pertama.



Munisipalitas adalah wilayah administratif tingkat satu di Latvia. Sedang Wilayah metropolitan adalah sebuah wilayah yang terdiri dari aglomerasi perkotaan padat penduduk, kawasan industri, kawasan komersial, jaringan transportasi, infrastruktur, dan area perumahan. Wilayah metropolitan biasanya terdiri dari beberapa kota dan munisipalitas utama, yang mencakup desa, kota kecil, kotapraja, borough, pinggiran kota, kabupaten, distrik, dan kotamadya di tingkat negara bagian. Seiring dengan evolusi institusi sosial, ekonomi, dan politik, kota-kota metropolitan telah muncul sebagai pusat ekonomi dan politik yang signifikan.

2. Bentuk Pemerintahan Latvia dan implikasinya dalam Lembaga Perwakilan Rakyat

Struktur pemerintahan Republik Latvia lebih bersifat republik dan bukan monarki. Dalam sistem republik, orang yang menduduki jabatan kepala negara biasanya dipilih melalui proses demokrasi atau dipilih oleh rakyat. Sebaliknya, dalam sistem monarki, kepala negara biasanya adalah anggota keluarga kerajaan atau dinasti yang mengambil peran tersebut melalui warisan.¹¹

Presiden Republik Latvia, yang dipilih oleh Saeima (parlemen Latvia) untuk masa jabatan tertentu, menjabat sebagai kepala negara di Latvia. Presiden mempunyai fungsi simbolis dan mempunyai kewenangan khusus dalam mengawasi proses politik dan kebijakan luar negeri, meskipun kekuasaannya relatif terbatas dibandingkan dengan sistem monarki konstitusional. Selain itu, struktur pemerintahan Republik Latvia mencakup parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Latvia, sebagai sebuah republik, memperoleh otoritasnya dari kedaulatan rakyat dan mendelegasikan kekuasaan politik kepada lembaga-lembaga yang dipilih secara demokratis, bukan kepada keluarga kerajaan atau dinasti.

¹¹ Rodina, A. (2021). Constitutional Court as a guardian of the Latvian legal system. *Strani pravni život*, 65(4), 579-596.

Struktur pemerintahan Republik Latvia bercirikan bentuk Republik, yang mencakup pembagian wewenang antara lembaga perwakilan rakyat, khususnya Saeima (parlemen Latvia), dan lembaga eksekutif, termasuk presiden dan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri.¹²

Saeima adalah entitas terpilih di Latvia yang berfungsi sebagai badan perwakilan rakyat. Ia dipilih langsung oleh penduduk Latvia melalui pemilihan umum. Saeima memiliki yurisdiksi legislatif untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan melaksanakan tugas legislatif tertentu. Saeima, yang berfungsi sebagai entitas perwakilan masyarakat Latvia, mengambil peran bertindak atas nama mereka.¹³

Di Republik Latvia, Presiden berperan sebagai kepala negara dan dipilih oleh Saeima untuk masa jabatan yang ditentukan. Fungsi presiden pada dasarnya bersifat simbolis dan representatif, namun ia memiliki kewenangan khusus, seperti kemampuan menunjuk dan mengawasi berbagai lembaga pemerintah, serta terlibat dalam urusan luar negeri.

Perdana Menteri Latvia dipilih oleh Saeima dan memegang tanggung jawab atas kebijakan pelaksanaan negara dan pelaksanaan keputusan

¹² Jumakova, A. (2020). Content of the child's right to identity within the scope of the Convention on the rights of the child and the Latvian national framework. *Miscellanea Historico-Iuridica*, 19(1), 223-244.

¹³ <https://saeima.lv/en>

Saeima. Cabang eksekutif pemerintahan mempunyai kewenangan untuk mengawasi administrasi publik, menegakkan undang-undang yang ditetapkan oleh Saeima, dan memantau pelaksanaan kebijakan negara.

Pembagian kekuasaan di Republik Latvia membentuk sistem pemerintahan yang bercirikan keseimbangan. Dalam sistem ini, tanggung jawab utama pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah terletak pada lembaga perwakilan rakyat, yang disebut Saeima. Sebaliknya, lembaga eksekutif, yang terdiri dari presiden dan pemerintah, bertugas melaksanakan kebijakan dan administrasi negara. Oleh karena itu, jelas terlihat bahwa kewenangannya berbeda dan terbagi antara legislatif dan eksekutif dalam struktur republik demokratis.¹⁴



¹⁴ Briede, I. Political Party Interest In Having Members: Explaining The Different Party Membership Levels In Estonia And Latvia Ma Thesis.

3. Sistem Pemerintahan Latvia dan implikasinya dalam Lembaga Kepresidenan

Republik Latvia beroperasi di bawah sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem khusus ini, pelaksanaan kekuasaan eksekutif dipercayakan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan perdana menteri, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen atau badan legislatif yang dipilih langsung oleh masyarakat.

Kepemimpinan pemerintah Latvia dipegang oleh perdana menteri, yang menjabat sebagai kepala eksekutif. Perdana menteri berperan sebagai pemimpin yang mewakili partai politik yang memegang mayoritas di parlemen, atau sebagai alternatif, dipilih melalui koalisi partai politik yang bersama-sama memiliki mayoritas di parlemen. Perdana menteri memikul tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pemerintah dan melaksanakan kegiatan eksekutif negara.

Saeima, juga dikenal sebagai parlemen Latvia, memegang kekuasaan legislatif tertinggi di negara tersebut. Saeima memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengesahkan anggaran negara, mengawasi pemerintah, dan melaksanakan tugas legislatif lebih lanjut. Anggota Saeima dipilih secara demokratis oleh masyarakat melalui pemilihan umum berkala yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali.

Pemerintah Latvia, di bawah kepemimpinan perdana menteri, memikul tanggung jawab untuk

mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan mereka kepada Saeima, sebuah badan legislatif yang dipilih melalui cara demokratis. Agar rencana pemerintah dapat dilaksanakan, mereka harus mendapat dukungan mayoritas di Saeima.¹⁵

Saeima memiliki kemampuan untuk menggulingkan pemerintah Latvia melalui mosi tidak percaya. Jika Saeima menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, perdana menteri dan kabinetnya harus mundur atau memulai pemilu baru. Oleh karena itu, di Republik Latvia, kekuasaan eksekutif berasal dari parlemen, dan pemerintahan bertanggung jawab kepada parlemen untuk melaksanakan program pemerintah dan melaksanakan tugasnya.

Sistem pemerintahan parlementer di Republik Latvia memerlukan peran presiden yang relatif seremonial dan terbatas dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial. Beberapa dampak dari sistem pemerintahan parlementer terhadap kedudukan presiden diantaranya adalah:

Fungsi Presiden Republik Latvia pada dasarnya bersifat seremonial, bukan didorong oleh kekuasaan. Presiden, selain menjabat sebagai kepala negara, mengemban tanggung jawab utama mewakili negara dalam urusan seremonial, meliputi upacara

¹⁵ Juzefovičs, J. (2011). Mapping Digital Media: Latvia: a report by the Open Society Foundations.

kenegaraan, perayaan nasional, dan hubungan diplomatik dengan negara asing.

Presiden dipilih oleh Saeima, badan legislatif Latvia, untuk masa jabatan yang ditentukan. Saeima melakukan proses pemilihan presiden setelah pemilihan umum. Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas dalam pemilihan umum, Saeima memilih presiden dari kumpulan kandidat yang diusulkan.¹⁶



Dalam sistem pemerintahan parlementer, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden memiliki kewenangan khusus, termasuk hak prerogatif untuk menunjuk dan memberhentikan berbagai pejabat pemerintah. Namun, pilihannya harus mematuhi ketentuan konstitusi dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan perdana menteri.

Presiden bekerja sama erat dengan pemerintah, yang dipimpin oleh perdana menteri, di bawah sistem parlementer. Meskipun mempunyai kewenangan khusus, hubungan presiden dengan pemerintah lebih bersifat kolaborasi dibandingkan konfrontasi. Presiden biasanya berperan sebagai

¹⁶ Köker, P. (2013). Latvia–President Bērziņš and the difficulties of forming a new government. Presidential Power.

simbol yang mewakili kohesi nasional dan berperan sebagai mediator dalam ranah politik.¹⁷

Meskipun presiden dipilih langsung oleh Saeima, penting untuk dicatat bahwa presiden tetap bertanggung jawab kepada parlemen. Jika Saeima menyetujui mosi tidak percaya, presiden mungkin terpaksa pensiun atau menjalani pemilihan presiden baru.

Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan parlementer di Republik Latvia, fungsi presiden relatif terbatas dan bersifat simbolis dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, kekuasaan utama terkonsentrasi di parlemen, dan perdana menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan.

Perdana Menteri Republik Latvia menjabat sebagai kepala eksekutif negara dan memegang posisi penting dalam mengawasi aspek operasional pemerintahan dan merumuskan strategi pemerintahan. Adapun peran dan kedudukan perdana menteri di Republik Latvia sebagai berikut:¹⁸

Pertama: Sebagai Kepala Pemerintahan. Kepala pemerintahan Latvia adalah Perdana Menteri. Dia mengambil alih kepemimpinan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan dan

¹⁷ Rodiņa, A. (2016). Constitutional Regulation on the Oath of the State President. Case of the Republic of Latvia. *Studia Politologiczne*, 39, 171-193.

¹⁸ Morris, H. M. (2004). President, party and nationality policy in Latvia, 1991–1999. *Europe-Asia Studies*, 56(4), 543-569.

menetapkan arah kebijakan negara. Perdana Menteri memikul tanggung jawab atas semua tindakan pemerintah.

Kedua: sebagai Pemimpin Kabinet. Perdana Menteri memegang kendali kepemimpinan kabinet atau kabinet menteri, yang terdiri dari menteri-menteri yang memegang tanggung jawab masing-masing untuk berbagai departemen atau portofolio pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada keuangan, urusan luar negeri, pendidikan, dan kesehatan.

Ketiga: Sebagai Pelaksana Kebijakan. Perdana Menteri memikul tanggung jawab melaksanakan program pemerintah yang telah mendapat persetujuan dari Saeima, badan legislatif Latvia. Penting baginya untuk mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Keempat: Sebagai penjaga Hubungan Eksternal. Perdana Menteri berperan sebagai perwakilan Latvia dalam interaksi diplomatiknya dengan negara asing dan lembaga internasional. Individu tersebut mengambil alih kepemimpinan delegasi Latvia selama pertemuan internasional dan secara aktif berkontribusi terhadap pemeliharaan hubungan diplomatik dengan negara-negara mitra.

Kelima: Sebagai Pelaksana Koordinasi Pemerintahan. Tanggung jawab mengarahkan semua tindakan pemerintah terletak pada Perdana Menteri. Sangat penting baginya untuk membangun kolaborasi yang efektif di antara semua departemen

dan lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Keenam: Bertanggung jawab kepada Parlemen. Perdana Menteri harus memberikan laporan berkala kepada Saeima mengenai kinerja pemerintah dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Parlemen. Jika anggota parlemen menganggap kinerja pemerintah tidak dapat diterima, ia juga dapat dikenakan mosi tidak percaya.¹⁹

Oleh karena itu, perdana menteri mengambil posisi yang sangat penting dalam kerangka pemerintahan Republik Latvia. Dia menjabat sebagai eksekutif puncak yang bertugas melaksanakan kebijakan negara dan mengawasi operasi sehari-hari pemerintah. Ia memegang posisi penting dalam politik dalam negeri Latvia dan urusan internasional.



¹⁹ Morris, H. M. (2004). President, party and nationality policy in Latvia, 1991–1999. *Europe-Asia Studies*, 56(4), 543–569.

C. EPILOG

Kerangka konstitusional Republik Latvia mencakup penggabungan khas sistem pemerintahan republik parlementer dan kehadiran presiden sebagai otoritas tertinggi. Latvia menerapkan sistem pemerintahan republik parlementer, di mana perdana menteri dan kabinetnya memikul tanggung jawab atas penerapan kebijakan negara dan pemerintahan sehari-hari.

Saeima, parlemen Latvia, memilih perdana menteri yang mengambil alih kepemimpinan pemerintah dengan dukungan mayoritas di parlemen. Di samping itu, terdapat juga presiden sebagai kepala negara, yang memainkan peran yang lebih seremonial dalam sistem politik Latvia. Presiden dipilih oleh Saeima untuk masa jabatan tertentu dan bertugas mewakili negara dalam hal-hal seremonial, menjaga stabilitas politik, dan memainkan peran diplomatik.

Dalam kerangka konstitusi Republik Latvia, perdana menteri mempunyai tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sebaliknya, presiden mengambil posisi simbolis sebagai kepala negara dan diberi tugas menjaga kohesi dan stabilitas nasional. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan antara otoritas eksekutif dan fungsi simbolis dalam kerangka pemerintahan Latvia.

REFERENSI:

Briede, I. Political Party Interest In Having Members: Explaining The Different Party Membership Levels In Estonia And Latvia Ma Thesis.

Daškevičs, A. (2022). Human rights in the emergency situation: constitutional perspective of Latvia.

Dupate, K. (2016). The constitutional social security rights in Latvia. *Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej*, 23.

<https://saeima.lv/en>

Jumakova, A. (2020). Content of the child's right to identity within the scope of the Convention on the rights of the child and the Latvian national framework. *Miscellanea Historico-Iuridica*, 19(1), 223-244.

Juzefovičs, J. (2011). Mapping Digital Media: Latvia: a report by the Open Society Foundations.

Köker, P. (2013). Latvia–President Bērziņš and the difficulties of forming a new government. Presidential Power.

Kučs, A. (2014). Protection of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latvia during the Interwar Period and after the Restoration of Independence. *Journal of the University of Latvia. Law*, (7), 54-62.

Morris, H. M. (2004). President, party and nationality policy in Latvia, 1991–1999. *Europe-Asia Studies*, 56(4), 543-569.

- MUIŽNIEKS, N. (2020). The Influence of the Idea of Human Rights on Latvia. *THE CENTENARY OF LATVIA'S FOREIGN AFFAIRS*, 168.
- Pleps, J. (2009). Fundamental Rights and Latvian Constitution (1918–1934). *Miscellanea Historico-Iuridica*, 8(2), 11-26.
- Rodiņa, A. (2014). Constitutional Court of the Republic of Latvia: constitutional regulation, competence and content of the petitions. *Studia Politologiczne*, 32, 273-300.
- Rodiņa, A. (2016). Constitutional Regulation on the Oath of the State President. Case of the Republic of Latvia. *Studia Politologiczne*, 39, 171-193.
- Rodiņa, A. (2017). Welfare As A Constitutional Value In The Constitution Of The Republic Of Latvia. *Приложение На Конституционните Принципи В Публичното И Частното Право*, 72.
- Rodina, A. (2021). Constitutional Court as a guardian of the Latvian legal system. *Strani pravni život*, 65(4), 579-596.
- RODIŅA, A., KĀRKLIŅA, A., & Vogin, F. (2018). *REPUBLIC OF LATVIA*. *European Review of Public Law*, 30(4).
- Zaagman, R. (1999). Conflict prevention in the Baltic States: the OSCE high commissioner on national minorities in Estonia, Latvia and Lithuania.

Ziemele, I., Spale, A., & Jurcína, L. (2020). The Constitutional Court of The Republic of Latvia. *The Max Planck Handbooks in European Public Law*, 3, 505-564.